

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA ALAT  
TES URINE NARKOBA ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PT SARANA KARYA  
MEDIKA (SURAT PERINTAH KERJA NOMOR :  
SPK/141/IV/PPK/2020/BNNP)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**MUHAMMAD FARHAN SALIM**

**1810112117**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)**

**Pembimbing :**

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H**

**Andalusia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba merupakan proses untuk menyediakan kebutuhan alat tes urine di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP). Untuk itu perlu diadakan proses perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba dengan melakukan pengadaan barang/jasa oleh PT Sarana Karya Medika selaku penyedia Barang. Sehubungan dengan hal diatas, peneliti melakukan penelitian dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan rumusan permasalahan yaitu : 1) Bagaimana proses pengadaan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan PT Sarana Karya Medika. 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional dan PT Sarana Karya Medika. 3) Apa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional dan PT Sarana Karya Medika. Metode penelitian didalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang bersifat deskriptif yaitu dengan melihat langsung fakta yang ada dilapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada proses pengadaan alat tes urine narkoba ini masih ada beberapa proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan masih menggunakan Perpres No.54 Tahun 2010. 2) Pelaksanaan perjanjian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pelaksanaan pekerjaan yaitu pengadaan alat tes urine narkoba dilaksanakan selama 15 hari kalender, mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2020, dengan nilai kontrak yaitu Rp.15.680.000,00,- dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung. 3) Kendala yuridis yaitu BNNP masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, karena Perpres terebut telah resmi dicabut dan tidak berlaku sejak 1 Juli 2018 dan digantikan dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan kendala teknis yaitu kurangnya wawasan serta kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

**Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Langsung**

